

ANALISA PARTISIPASI POLITIK DI AMERIKA SERIKAT

Halifa Haqqi

Abstract

Political participation is important thing of democratic system. United States of Amerika as “father of democracy” has a lot of kind of political participation such as voting, campaign activity, Particularized Contacting, Cooperative Activity, and Unconventional Participation. Many factors that influence political participation, it is make deferences of total political participation in United States of America

Key Word: Participation; Political; USA

Pendahuluan

Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara merupakan unsur yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Pendukung-pendukung demokrasi liberal biasanya berasumsi bahwa ada hubungan langsung dan hubungan sebab akibat antara partisipasi massa dalam politik dan tingkat martabat manusia. Dalam artian lain, partisipasi politik itu merupakan kegiatan yang dilakukan warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. (Sudjiono Sastroatmodjo, 1995: 67). Demikian juga yang diungkapkan oleh Samuel Huntington dan Joan Nelson (1994: 6) yang mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Pada awalnya hak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik, untuk pemberian suara atau untuk menduduki jabatan pemerintah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan terpandang. Kecenderungan kearah partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik bermula pada masa Renaissance dan Reformasi abad ke-15 sampai abad ke-17 dan abad ke-18 dan 19. Menurut dari Myron Weiner dalam Mohtar Mas' oed dan Colin MacAndrews (1991: 45-46) paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah

partisipasi yang lebih luas dalam bidang politik, yaitu;

1. *Modernisasi*. Komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media komunikasi massa. Ketika penduduk kota baru – yaitu buruh, pedagang dan kaum profesional – merasa bahwa mereka ternyata dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri, mereka makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
2. *Perubahan-perubahan Struktur Kelas Sosial*. Begitu terbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.
3. *Pengaruh Kaum Intelektual dan Komunikasi Massa Modern*. Kaum intelektual – sarjana, filosof, pengarang dan wartawan – yang sering mengemukakan ide-ide seperti egaliterisme dan nasionalisme kepada masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Sistem transportasi dan komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru. Kaum

intelektual telah sejak lama menjadi pembuat dan penyebar ide-ide yang mampu merubah sikap-sikap dan tingkah laku dari kelas sosial lain.

4. *Konflik di Antara Kelompok-Kelompok Pemimpin Politik.* Apabila timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar “hak-hak” ini dipenuhi. Jadi, kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan kaum aristocrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
5. *Keterlibatan Pemerintah yang Meluas dalam Urusan Sosial, Ekonomi dan Kebudayaan.* Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsensus tindakan-tindakan pemerintahan menjadi semakin menyusup ke segala segi kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat merugikan kepentingannya. Maka dari itu, meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang teroganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Robert Huckshorn (1984: 195-196) menyebutkan bahwa hal ini juga terjadi di Amerika Serikat, hak memilih pada awal kemerdekaan hanya dimiliki kalangan tertentu. Partisipasi massa dalam proses politik semakin meluas kepada beberapa kelompok sosial masyarakat:

1. Rakyat jelata dan bukan pembayar pajak (*Non property owners and Non taxpayers*). Pada mulanya hanya orang-orang yang mempunyai harta dan pembayar pajak yang berhak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun secara berangsur-angsur pada awal abad ke-19 pemerintah menghilangkan aturan tersebut, hal ini semakin meningkatkan partisipasi massa khususnya laki-laki kulit putih. Pada saat perang saudara tidak ada negara bagian yang membatasi partisipasi politik berdasarkan pada kekayaan, dan hanya beberapa negara bagian yang mensyaratkan para pembayar pajak yang berhak memilih dalam pemilu. Namun hal ini dihapuskan dengan amandemen XXIV tahun 1964 dan keputusan mahkamah agung tahun 1966.
2. Wanita (*Women*). Lima puluh tahun antara tahun 1870-1920 mulai terlihat semakin meningkatnya tekanan dari kaum wanita untuk berhak ikut serta dalam pemilihan umum. Pada awalnya mereka memperjuangkan tuntutan itu hanya di tingkat negara bagian, namun setelah beberapa tahun mereka mengambil kesimpulan bahwa amandemen undang-undang dasar Amerika Serikat merupakan satu-satunya cara untuk menjamin kaum wanita untuk berhak mengikuti pemilihan umum. Akhirnya tuntutan tersebut terwujud pada tahun 1920 dengan lahirnya amandemen XIX yang menjamin bahwa setiap warga negara Amerika Serikat berhak berpartisipasi dalam pemilihan umum tanpa adanya diskriminasi jenis kelamin.
3. Kulit Hitam (*Blacks*). Tuntutan untuk memperoleh hak pilih dalam pemilihan umum dari kaum kulit hitam merupakan hal yang paling merepotkan bagi pemerintahan Amerika Serikat dibandingkan dengan tuntutan dari kelompok lain. Setelah perang saudara beberapa negara bagian mulai mengikutsertakan kaum kulit hitam untuk berpartisipasi dalam pemilihan

umum sebagai wujud dari pelaksanaan amandemen XV, yang menjamin warga Negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemilu, “tanpa adanya diskriminasi terhadap ras, warna kulit atau bekas budak”. Pada masa perang saudara hambatan legal terhadap hak pilih kaum kulit hitam, yaitu adanya “*grandfather clauses*” dan “*the white primary*”, hal ini sangat mengurangi partisipasi politik kaum kulit hitam. “*Grandfather Clauses*” menerapkan bahwa hanya orang-orang yang kakeknya pernah mengikuti pemilu pada tahun 1867 yang berhak memperoleh hak suara, “*white primary*” menghambat partisipasi dalam pemilihan di tingkat pusat. Dengan lahirnya *Voting Rights Act of 1965*, peserta pemilu dari kalangan kulit hitam semakin meningkat, bukan hanya di negara-negara bagian selatan Amerika Serikat tetapi juga di negara-negara bagian yang lain, dan partisipasi memilih serta kandidat kulit hitam semakin meningkat secara dramatis. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah pemilih dari kalangan kulit hitam yang pada tahun 1940 hanya sekitar 250.000 meningkat menjadi 3.560.856, meningkat dari 5% menjadi 59% pada tahun 1968.

4. Kaum muda (*Young People*). Partisipasi massa dalam pemilu yang paling menonjol pada tahun 1970. sampai tahun 1971 hanya empat negara bagian yang mengizinkan warganegara yang berumur kurang dari 21 tahun yang berhak ikut pemilu. Georgia dan Kentucky yang mempunyai hak pilih minimal berusia 18 tahun, Alaska 17 tahun 19 tahun, dan Hawaii 20 tahun. Walaupun pada tahun 1970 kongres telah memutuskan bahwa warganegara yang telah berumur 18 tahun yang berhak ikut pemilu baik pemilu di negara bagian maupun pemilu di tingkat pusat. Beberapa bulan kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan aturan bahwa porsi mengenai pemilu di tingkat pusat perlu

dicantumkan dalam undang-undang, tetapi tidak mengatur pemilu di tingkat lokal. Kongres akhirnya mengajukan rencana amandemen yang mengatur bahwa yang berhak memilih dalam pemilu adalah minimal berusia 18 tahun untuk semua jenis pemilu baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal. Hal ini mendapat tanggapan dari dewan legislatif dengan dikeluarkannya Amandemen XXVI pada tahun 1971, dan hal ini sangat berpengaruh pada pemilihan presiden tahun 1972.

Dari apa yang kita lihat di atas terlihat bahwa partisipasi politik massa di Amerika Serikat mulai meningkat melalui tahapan-tahapan dan proses-proses tertentu. Selain itu jumlah pemilih di Amerika Serikat semakin bertambah secara teratur dikarenakan empat alasan. *Pertama*, jumlah penduduk yang semakin bertambah. *Kedua*, hak-hak sipil yang memperbolehkan kulit hitam untuk memilih terutama di wilayah Amerika Serikat bagian selatan. *Ketiga*, aturan-aturan registrasi yang telah disederhanakan dan dipermudah di beberapa negara bagian. Dan *keempat*, diberikannya hak pilih bagi mereka yang berusia 18 sampai 20 tahun. (Edward V David, 1985: 83)

Partisipasi politik di suatu negara terdiri dari bermacam-macam bentuk. Ada yang konvensional (legal) seperti pemilihan umum dan kegiatan kampanye. Amerika Serikat sendiri termasuk salah satu Negara yang kegiatan pemilihannya paling banyak, karena pemilihan tidak hanya dilakukan untuk memilih presiden dan anggota kongres, tetapi juga untuk memilih anggota kongres Negara bagian, gubernur dan walikota. Sedangkan partisipasi politik yang kedua adalah *non-konvensional* (illegal) seperti demonstrasi dan kekerasan. Ini dapat dilihat dari banyaknya kaum politik yang terbunuh di Amerika Serikat seperti, John F. Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, dan lain-lain. Tindak kekerasan seperti ini banyak dilakukan oleh kaum menengah kebawah yang terdiri dari kaum kulit hitam

yang menuntut persamaan politik dan sosial, dan juga banyak tindakan ini dilakukan oleh gerakan kulit putih yang menentang integrasi kulit hitam di Amerika Serikat.

Apabila dilihat dari segi jumlahnya, partisipasi politik melalui pemilihan suara di Amerika Serikat memang sedikit jumlahnya. Akan tetapi, pemilihan suara memang bukan satu-satunya bentuk dari partisipasi politik. Masih banyak bentuk partisipasi politik yang berjalan secara kontinu dan tidak terbatas. Aktifnya partisipasi politik warga negara Amerika Serikat di luar bentuk partisipasi pemilihan suara dapat dilihat dalam aktifnya mereka untuk mencari pemecahan bermacam-macam masalah masyarakat dan lingkungannya melalui kegiatan lainnya.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh warga Negara bermacam-macam bentuknya, yakni berupa *voting*, *campaign activity*, *particularized contacting*, *cooperative activity*, *unconventional participation*, dan *non-participation*. (Calvin Mackenzie, 1986: 47-52)

1. Voting

Voting adalah keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan umum. Untuk warga negara Amerika Serikat, ikut serta dalam pemilihan umum merupakan satu-satunya kegiatan yang mereka ikuti secara teratur, dan juga sifat pemilihan umum tersebut adalah sukarela sehingga tidak terdapat paksaan dan ancaman bagi setiap warga negara untuk memilih, karena pemerintah Amerika Serikat memberikan kebebasan penuh sesuai dengan prinsip kebebasan individu. Dibandingkan bentuk partisipasi lain, jumlah warga negara Amerika Serikat yang mengikuti pemilu lebih banyak. Namun, ada juga warga Negara yang tidak mengikuti pemilihan umum dikarenakan berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut antara lain karena masalah registrasi atau pendaftaran yang cukup merepotkan untuk masyarakat

modern. Selain faktor tersebut, faktor yang membuat sulit para pemilih di Amerika Serikat adalah faktor cuaca yang berubah-ubah dan juga tempat pemilihan yang jauh sehingga membuat pemilih usia lanjut mengurungkan niatnya.

Di bawah ini ditampilkan tabel 1 yang menunjukkan alasan sebagian warga Amerika Serikat tidak mengikuti pemilihan pada pemilihan presiden tahun 1996, 2000, 2004 dan 2008.

Tabel 1. Alasan Warga Negara Amerika Serikat Tidak Memilih

Alasan	Persentase Alasan			
	1996	2000	2004	2008
Tidak terdaftar	34%	28%	38%	42%
Tidak menyukai kandidat	12%	10%	14%	17%
Tidak ada alasan khusus	8%	13%	10%	10%
Tidak tertarik pada politik	7%	4%	10%	5%
Sakit	15%	11%	7%	8%
Bukan warga Negara AS	-	-	4%	5%
Pendatang baru	10%	8%	4%	4%
Pergi ke luar kota	6%	5%	3%	3%
Bekerja	3%	7%	2%	3%
Tidak datang ke lokasi Pemilu	-	-	2%	1%
Tidak hadir dalam pemilu	2%	1%	1%	-
Alasan lain	3%	13%	5%	2%

Sumber: (David V Edwards, 1985: 87)

Pemilihan umum di Amerika Serikat juga dipengaruhi oleh karakteristik social dari pemilih tersebut. Seseorang yang telah mapan, pendapatannya tinggi, berpendidikan baik dan berstatus social tinggi, akan cenderung untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum daripada orang yang pendapatan dan pendidikannya rendah.

2. Campaign Activity

Kegiatan kampanye merupakan partisipasi politik warga Negara pada masa kampanye. Kegiatan kampanye

merupakan salah satu cara yang paling efektif secara individual dalam mempengaruhi kebijakan public. Kegiatan kampanye berbeda dengan memberikan suara dalam pemilihan umum. Kegiatan kampanye membutuhkan keaktifan dari para kandidat dan para pendukungnya. Sedangkan mayoritas dari pekerja kampanye tersebut adalah para sukarelawan dan para kandidat yang dicalonkan.

Menurut Robert Agranoff, ada empat poin penting yang harus dibedakan dari gaya kampanye tradisional dan modern. *Pertama*, para kandidat tersebut, bukan partai kandidat, di dalam kampanye modern, harus sering menjadi fokus utama. Seringkali para kandidat menghapus referensi literatur partai mereka pada saat kampanye dan menghubungkan isu-isu yang mereka angkat menjadi permasalahan yang dihadapi oleh para kandidat tersebut dan melepaskan diri dari afiliasi partai mereka masing-masing. Dan pada umumnya, organisasi kampanye yang baik seringkali dilakukan oleh para kandidat, bukan oleh partai. *Kedua*, cara-cara baru dari kampanye dimulai sejak Perang Dunia II, menggunakan kekuatan partai untuk menjalankan kampanye yang menggunakan tenaga-tenaga profesional, seperti spesialis manajemen, *pollster*, orang-orang periklanan dan konsultan *public relation*. Akan tetapi, ini menimbulkan keraguan bagi para pemilih yang akan memilih kandidat, karena mereka melihat partai politik tersebut tidak mempunyai seseorang yang mampu untuk menjalankan kampanye secara profesional dan terorganisasi. Sehingga banyak dari para kandidat yang berperan sebagai orang-orang yang mampu untuk menjalankan peran-peran tersebut, dan yang tidak dapat dilakukan oleh partai, seperti perencanaan, peneliti pasar, *public*

relations dan seorang professional periklanan. *Ketiga*, perbedaan antara cara lama dan baru dari manajemen kampanye tersebut juga bersumber dari perkembangan teknologi itu sendiri. Manajemen kampanye yang baru, menggunakan penelitian yang sistematis menggabungkan survey dan penghitungan suara serta diproses melalui komputer. Penggunaan teknologi seperti ini sudah banyak diletakkan di berbagai lokasi dan digunakan juga oleh partai. *Keempat*, cara-cara kampanye juga berubah dikarenakan adanya revolusi komunikasi. Pada awalnya, organisasi partai mengontrol komunikasi kampanye. Informasi diberikan kepada pemilih melalui pidato-pidato, *handouts*, dan gerakan partai tersebut. Pada saat ini, control dari distribusi informasi kampanye telah diberikan kepada kandidat dan staff mereka, mencakup *professional telephone banks*, periklanan televisi dan radio, serta distribusi material secara *door-to-door*. (Robert Huckshorn, 1984: 131)

3. Particularized Contacting

Particularized contacting adalah bentuk partisipasi politik dimana warga Negara mengadakan kontak dengan tokoh politik atau lembaga public yang bertujuan untuk merubah kebijakan publik. Isu-isu yang diangkat biasanya menyangkut kesejahteraan rakyat atau Negara, namun masalah yang dikemukakan cenderung masalah pribadi yang dihadapi oleh individu tersebut. Misalnya orang tua yang mempunyai anak cacat, menghubungi badan kesejahteraan Negara untuk mendapatkan pelatihan bagi anaknya tersebut dan seseorang yang datang pada pertemuan dewan kota yang mengajukan usul untuk perbaikan taman kota, dan sebagainya. Yang menarik dari partisipasi ini adalah bahwa mereka yang melakukannya bukanlah orang yang aktif dalam bidang politik.

Kenyataannya banyak di antara mereka yang tidak tertarik pada politik.

4. Cooperative Activity

Warga negara Amerika Serikat yang ingin mempengaruhi kebijakan public dan yang memikirkan tentang strategi yang efektif untuk mempengaruhi kebijakan public akan mempertimbangkan bahwa pesan mereka akan lebih memberi dampak apabila berasal dari suatu kelompok dibandingkan pesan yang berasal dari individu. Hal ini tidak lain merupakan hukum politik yang mengatakan bahwa “kekuatan adalah jumlah”.

Banyak kelompok kepentingan yang menggunakan partisipasi ini. Dari kalangan bisnis seperti kalangan bisnis otomotif, berusaha untuk memperluas pasar mereka dengan cara mencari dukungan dari senat Amerika Serikat. Untuk mencapai tujuannya, diperlukan *lobby* agar kepentingan mereka tersebut dapat terpenuhi., dan *lobby* yang dilakukan di Washington merupakan pengaruh yang kuat untuk dapat membuat suatu perubahan.

5. Unconventional Participation

Dalam sebuah sistem politik yang demokratis, sistem tersebut akan memberi sebuah cara-cara partisipasi bagi seluruh warga negaranya, dimana pemilihan umum merupakan bentuk yang paling umum. Namun, tidak semua partisipasi massa tersebut dilakukan dengan cara yang telah ada dan tersedia, ada kalanya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dalam bentuk yang *unconventional*. Bentuk partisipasi seperti ini adalah dengan cara demonstrasi, protes, kerusuhan, kekerasan, pembunuhan politik hingga dengan cara sebuah revolusi. Bentuk partisipasi seperti ini banyak dilakukan oleh kaum menengah ke bawah di Amerika Serikat.

Apabila kita kembali ke sekitar tahun 1960-an, banyak dari kaum miskin kulit hitam yang menggunakan partisipasi seperti ini yang menuntut persamaan politik dan sosial dan menuntut undang-undang segregasi yang memisahkan kaum kulit hitam dan kulit putih atau juga demonstrasi yang dilakukan oleh kulit putih yang bersifat rasialis yang menentang integrasi tersebut. Ditambah lagi atas banyaknya penolakan rakyat Amerika Serikat yang menentang perang melawan Vietnam. Partisipasi seperti ini yang dipilih oleh warga negara untuk bersuara di depan publik dan berharap dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Tabel 2
Sikap Warga Negara AS Terhadap Demonstrasi Damai dan Demonstrasi Melalui Kekerasan

Demonstrasi Damai	2004	2008	Demonstrasi Kekerasan	2004	2008
Setuju	18%	18%	Setuju		
Tergantung / ragu-ragu	25%	40%	Tergantung / ragu-ragu	7%	8%
Tidak Setuju	49%	40%	Tidak Setuju	16%	33%
Tidak Tahu	8%	2%	Tidak Tahu	67%	57%
Total	100%	100%		10%	3%
n =	1344	2705			

Sumber: (William Flamingan, 1987: 185)

Namun kebanyakan warga negara Amerika Serikat tidak setuju dengan bentuk partisipasi seperti ini, baik demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan maupun demonstrasi dengan damai. Dalam penelitian yang dilakukan antara tahun 1968 dan 1972 (masa perang Vietnam), pada tahun 1968 terlihat bahwa sekitar 18% penduduk Amerika Serikat setuju dengan demonstrasi damai dan 49% tidak setuju dengan demonstrasi damai, sedangkan 7% penduduk Amerika Serikat setuju dengan bentuk demonstrasi melalui kekerasan dan 67% tidak setuju dengan demonstrasi melalui kekerasan. Untuk jelasnya lihat tabel 2.

Sedangkan, apabila kita lihat dari segi usia, warga negara yang usianya

lebih muda lebih cenderung untuk melakukan partisipasi *unconventional* dibandingkan dengan warga negara yang berusia tua. Ini dilihat dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2008, terlihat disini sekitar 29% penduduk Amerika Serikat yang berusia 18-29 tahun setuju dengan demonstrasi damai. Untuk jelasnya, lihat tabel 3.

Tabel 3
Sikap Warga Negara AS Terhadap Demonstrasi Damai Berdasarkan Umur

Sikap	Umur			
	18-29	30-45	46-64	65 ke atas
Setuju	29%	20%	13%	9%
Ragu-ragu	50%	42%	37%	25%
Tidak Setuju	20%	38%	48%	61%
Tidak Tahu	1%	1%	2%	4%
Total	100%	101%	100%	99%
n	744	722	790	432

Sumber : William Flamingan, 1987: 185

6. Nonparticipation

Ada sejumlah warga Negara Amerika Serikat yang tidak berpartisipasi sama sekali dalam bidang politik. Mereka tidak mengikuti pemilihan umum, mereka tidak menjadi anggota dari suatu kelompok resmi, mereka tidak terlibat dengan kelompok politik, mereka juga tidak terlibat dengan demonstrasi, mereka adalah golongan orang-orang yang tidak aktif dalam bidang politik.

Menurut Arthur Hadley (dalam Saffel David, 1984: 167-168), golongan *nonparticipation* tersebut dapat dibagi menjadi enam golongan yaitu;

- Positive apathetics*, yang menganggap bahwa voting itu tidak relevan di mata mereka, dan terlalu berlebih-lebihan diberitakan oleh media.
- The bypassed*, golongan ini masih bersudut pandang tradisional yang tidak mau memberikan suara dalam keadaan apapun. Kebanyakan golongan ini

adalah orang-orang yang berpendidikannya dan yang mempunyai penghasilan rendah.

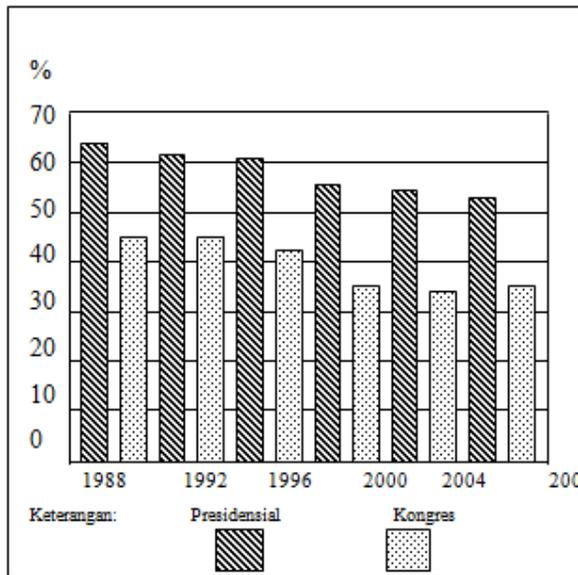
- Physically disenfranchised*, golongan ini adalah mereka yang tidak dapat memberikan suara karena sakit dan tidak dapat datang ke tempat pemberian suara.
- Naysayers*, golongan ini merasa diri mereka tidak perlu untuk mengikuti pemilihan suara walaupun mereka mempunyai pengetahuan tentang politik.
- Cross-pressured*, golongan ini mendapat tekanan dari keluarga dan lingkungan mereka tentang siapa dan partai apa yang harus mereka pilih. Ini termasuk juga misalnya seorang pendukung partai Demokrat yang tidak menyukai kandidat dari partai tersebut namun juga tidak dapat “menyeberang” ke partai Republik.
- Politically impotent*, golongan ini berpendapat bahwa apapun yang mereka lakukan tidak akan dapat mempengaruhi kebijakan dari pemerintah.

Apabila kita perhatikan dari pemilu ke pemilu di Amerika Serikat, golongan *nonparticipation* ini semakin bertambah. Pada tahun 1980, hanya 53% *voters* yang memilih di pemilihan umum presiden Amerika Serikat., kedua terendah sejak tahun 1948. sedangkan pada pemilihan anggota kongres, pada tahun 1978, hanya 35% yang memberi suara, terendah sejak tahun 1942. Untuk lebih jelas melihat penurunan *voters* di Amerika Serikat, lihat gambar 1.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Politik

Pola partisipasi politik tidak dapat ditentukan secara pasti, karena untuk menentukan siapa yang aktif dalam kegiatan politik dan siapa yang tidak aktif dalam kegiatan politik harus dilihat dari beragam faktor. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang aktif dalam politik, antara lain adalah pendidikan, status sosial, usia, jenis kelamin, ras dan agama.

Gambar 1.
Presentase Penurunan Jumlah Pemilih Di
Amerika Serikat



Sumber: David Saffel, 1984: 166)

1. Pendidikan

Banyak penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa warga negara yang mempunyai pendidikan yang tinggi maka semakin tinggi pula partisipasinya dalam politik, baik itu berupa keikutsertaan dalam pemilihan umum, aktif dalam kampanye, bahkan untuk mengejar jabatan dalam politik. Secara alamiah akan terjadi keterlibatan dalam bidang politik pada diri seseorang yang lebih tinggi pendidikannya dibandingkan mereka yang tidak berpendidikan. Ini dilihat dari sebagian besar para politikus dan yang duduk di dalam pemerintahan di Amerika Serikat adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Hal ini tentu dapat dimengerti karena pejabat pemerintah mempunyai tugas menjadi pelayan bagi masyarakat, sehingga kecerdasan diperlukan untuk menghadapi masalah dan tantangan yang ada dalam menjalankan roda pemerintahan.

2. Status Sosial

Tingginya suatu tingkat status sosial seorang warga negara tidak terlepas dari tingginya pendidikan yang mereka miliki. Apabila mereka mempunyai pendidikan yang tinggi biasanya mereka mempunyai sebuah pekerjaan yang baik yang mempunyai penghasilan yang besar. Mereka yang mempunyai status sosial yang tinggi ini lebih memperhatikan kampanye dan mempunyai peran dalam sebuah pemilihan umum daripada mereka yang memiliki status sosial yang rendah. Sedangkan mereka yang mempunyai status sosial yang rendah, kurang dapat berasimilasi dalam hal politik. Jika dilihat, sebagian besar pejabat pemerintah di Amerika Serikat pada umumnya merupakan lulusan perguruan tinggi. Bahkan beberapa presiden, pemimpin perusahaan besar, diplomat dan perwira militer biasanya berasal dari perguruan-perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat. Partisipasi masyarakat kelas atas sangatlah berpengaruh dalam bidang politik. Mereka dapat dikatakan sebagai subjek politik itu sendiri. Mereka lebih dapat untuk merubah keputusan politik dikarenakan mereka mempunyai dana dan organisasi yang kuat jika dibandingkan dengan masyarakat kelas rendah.

3. Usia

Usia mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Pada awal kemerdekaan, warga negara yang masih berusia muda di bawah 18 tahun tidak diperbolehkan untuk mengikuti pemilihan meskipun dia merupakan laki-laki kulit putih. Kemudian hak untuk memilih diperluas dengan diberikannya hak kepada mereka yang berusia 18 tahun. Berdasarkan *Voting Rights Act Amendments of 1970* batas minimal usia yang diperbolehkan untuk mengikuti pemilihan umum di tingkat Federal adalah 18 tahun. Dan

berdasarkan *Amandement XXVI* tahun 1971, batas minimal usia pemilih adalah 18 tahun untuk mengikuti semua bentuk pemilihan

Akan tetapi, warga negara yang berusia muda cenderung kurang berpartisipasi dalam politik, karena mereka merasa secara politik tidak mempunyai kekuatan untuk memberi pengaruh dalam pembuatan kebijakan publik. Menurut Bambang Cipto (2003: 25-28), terdapat empat kelompok umur yang berpartisipasi di bidang politik di Amerika Serikat, yaitu;

- a. Kelompok usia dibawah 26 tahun. Warga negara Amerika Serikat yang berusia di bawah 26 tahun pada umumnya kurang berminat pada partisipasi politik. Kelompok ini contohnya adalah mahasiswa, mereka tidak terlalu menyukai politik dan hanya memusatkan diri pada pendidikan mereka. Secara umum, apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan terlalu memberikan pengaruh yang cukup besar kepada kelompok ini.
- b. Kelompok usia 26-30 tahun. Kelompok ini, partisipasi politik mereka cenderung mulai tumbuh. Warga negara yang berusia 26-30 tahun biasanya sudah mendapatkan pendidikan yang tinggi. Banyak dari mereka yang sudah mendapat gelar master. Dengan pendidikan yang tinggi tersebut, mereka mencari pekerjaan yang mapan dan sudah mulai ada kebutuhan untuk ikut serta dalam dunia politik.
- c. Kelompok usia 31-40 tahun. Kelompok ini biasanya sudah mendapatkan peningkatan karir di dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu mereka sudah melakukan tindakan politik seperti *lobby* dengan kalangan birokrasi untuk dapat melancarkan keinginan mereka. Pertimbangan seperti ini yang membuat warga negara pada

usia ini mengalami peningkatan partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan golongan usia di bawah mereka.

- d. Kelompok usia 41-50. Kelompok usia ini biasanya telah menduduki jabatan-jabatan penting di tempat mereka bekerja, pada umumnya mereka sangat menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk menjalankan perusahaan tersebut. Untuk itu, mereka cenderung akan mendekati kalangan birokrat dalam melakukan *lobby* agar keputusan yang dibuat menguntungkan perusahaannya, atau paling tidak kebijakan yang dibuat tidak akan menghambat usaha yang mereka jalankan. Sudah tentu tingkat partisipasi mereka lebih tinggi dari golongan muda.

4. Jenis Kelamin

Jenis kelamin mempengaruhi tingkat partisipasi dalam bidang politik di Amerika Serikat. Pada awal kemerdekaan Amerika Serikat, kaum perempuan dilarang untuk tampil di muka umum atau berkarir terutama karir di bidang politik dan juga kaum perempuan tidak diberi hak untuk memilih oleh pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu. Akibat dari kondisi ini membuat kaum perempuan tidak aktif di bidang politik dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Kaum perempuan di Amerika Serikat dapat disebut sebagai kaum minoritas dalam proses pembuatan kebijakan. Ini karena kaum perempuan di Amerika Serikat jarang sekali terlihat melakukan tindakan-tindakan politik bila dibandingkan dengan laki-laki, seperti membaca koran, berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah politik, mengikuti pemilihan umum, turun ke jalan untuk berdemonstrasi memprotes kebijakan pemerintah dan sebagainya.

Akhirnya perbedaan ini dapat dihilangkan pada tahun 1920 dengan dikeluarkannya *Amandement XIX*, yang memberikan hak bagi kaum perempuan untuk mengikuti pemilihan umum. Sejak saat itu, tingkat partisipasi kaum wanita berkembang dengan pesat dan persentasenya hampir sama dengan partisipasi yang dilakukan oleh kaum pria, bahkan pada pemilihan presiden tahun 1976, perbedaan suara antara kaum perempuan dan laki-laki hanya sekitar 0,8% menurut biro sensus di Amerika Serikat. (Robert Huckshorn, 1984: 208)

Variasi partisipasi politik kaum perempuan Amerika Serikat ini terlihat dari, kaum perempuan muda cenderung lebih banyak daripada kaum perempuan yang sudah tua. Sedangkan kaum perempuan kulit putih yang tinggal diluar daerah selatan Amerika Serikat, yang notabene banyak terdapat kaum miskinnya, jumlah pemilihnya hampir sama banyaknya dengan kaum laki-laki akan tetapi partisipasi kaum perempuan kulit putih yang tinggal di daerah selatan Amerika Serikat jumlahnya sangat sedikit. Dilain sisi, partisipasi kaum perempuan kulit hitam yang tinggal diluar daerah selatan jumlahnya sedikit namun kaum perempuan kulit hitam yang memilih di daerah selatan jumlahnya sangat besar. Tingkat perbedaan ini semakin menyempit lagi dengan dikeluarkannya *the voting rights act of the 1950 and 1960*, dan beberapa kebijakan pemerintah lain memberikan kebebasan bagi perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik.

5. Ras dan Agama

Ras dan Agama mempunyai pengaruh dalam partisipasi warga negara dalam bidang politik. Di Amerika Serikat terdapat beberapa ras dan agama. Ras yang ada di Amerika Serikat meliputi; Kulit Putih (*White, Anglo-Saxon Protestants*), Kulit Hitam (*Blacks*), Hispanics (*Mexican-American,*

Spanish American dan *Cuban-American*), Indian (*Native American*) dan Asia (*Asian American*). Sedangkan agama yang ada di Amerika Serikat antara lain; Kristen protestan, Kristen katolik, Islam, Hindu, Budha, Yahudi dan lain-lain. Di Amerika Serikat ras kulit putih cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam bidang politik jika dibandingkan dengan ras lainnya. Sedangkan warga negara yang beragama Kristen protestan akan cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi di bidang politik jika dibandingkan dengan agama lain.

Namun penyebab utama kurang aktifnya warga negara berpartisipasi dalam bidang politik bukanlah semata-mata karena ia adalah kaum *nonwhite* atau juga bukan karena ia tidak beragama Kristen protestan, tetapi ada faktor lain yang juga mempengaruhi. Misalnya ras kulit hitam kurang aktif dalam politik karena pada awal kemerdekaan, mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan pemilihan oleh pemerintah Amerika Serikat dan juga pada umumnya mereka merupakan golongan rendah, kelas pekerja dan tidak berpendidikan.

Seiring dengan perkembangan jaman, kaum kulit hitam mulai mendapatkan perbaikan nasib. Mereka tidak lagi menjadi budak, mereka menjadi orang yang bebas dan memulai dengan hidup yang baru. Setelah *the Civil War*, partisipasi politik oleh kaum kulit hitam meningkat dengan memilih partai Republik, karena partai kandidat dari partai ini mengangkat masalah emansipasi di Amerika Serikat. Namun pada tahun 1932 kaum kulit hitam terjebak oleh fase depresi nasional, dan mereka menyalahkan presiden saat itu Herbert Hoover yang notabene berasal dari partai Republik karena gagal mempertahankan perekonomian Amerika Serikat. Oleh sebab itu, suara

kaum kulit hitam berbalik untuk mendukung partai Demokrat.

Demikian juga dengan golongan masyarakat yang beragama non Kristen protestan, partisipasi mereka di bidang politik lebih rendah jika dibandingkan dengan golongan masyarakat yang beragama Kristen protestan, karena kebanyakan warga negara non Kristen protestan adalah para imigran, miskin, berpendidikan rendah dan merupakan golongan masyarakat kelas bawah. Untuk partisipasi mereka, mereka terlihat lebih mengutamakan kepentingan kelompok mereka, seperti kaum Yahudi di Amerika Serikat, cenderung untuk memilih partai Demokrat karena partai tersebut menolak ideology Nazi. (Robert Huckshorn, 1984: 209-214)

Jumlah Partisipasi Politik di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat jumlah warga negara yang berpartisipasi melalui pemilihan umum tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan beberapa negara di Eropa barat, namun warga negara Amerika Serikat lebih aktif berpartisipasi untuk mencari pemecahan bermacam-macam masalah masyarakat dan lingkungannya melalui kegiatan lain, dibandingkan dengan warga negara dari negara lain. Dan juga mereka lebih cenderung untuk menggabungkan diri dalam organisasi-organisasi seperti misalnya organisasi politik, religius, bisnis, profesi, petani dan sebagainya daripada warga negara di negara lain.

Penelitian lain (Bambang Cipto, 2003: 22-23) menemukan sekitar 20-25% warga negara Amerika Serikat diperkirakan sama sekali tidak aktif dalam berbagai kegiatan politik. Kelompok ini sering digolongkan sebagai kelompok *inactives*. Sebagian besar kelompok ini tidak ikut dalam memberikan suara, tidak ikut berkampanye, tidak aktif dalam kegiatan komunitas serta tidak aktif dalam melakukan kontak dengan para pejabat pemerintah. Kelompok ini terdiri dari

warga negara yang tingkat sosial ekonominya rendah, banyak dari kaum kulit hitam, wanita, orang tua (di atas 55 tahun) dan kaum muda (di bawah 25 tahun).

Selanjutnya, sekitar 20% warga negara Amerika Serikat digolongkan sebagai *voting specialist*. Kelompok ini hanya aktif dalam memberikan suara, tetapi tidak aktif dalam mengadakan kegiatan politik lainnya. Mereka juga terdiri dari golongan sosial ekonomi yang rendah, tinggal di perkotaan dan hidup di daerah kurang terwakili.

Golongan selanjutnya adalah mereka yang disebut dengan *community activist*. Golongan ini diperkirakan sebanyak sekitar 20%. Kelompok ini lebih banyak menanamkan waktunya untuk kegiatan masyarakat. Mereka tidak secara langsung terlibat kegiatan politik kekuasaan.

Kemudian adalah golongan *campaigners* atau juga dapat disebut dengan golongan *campaign activist*. Mereka pada umumnya sangat aktif dalam memberikan suara dan kegiatan kampanye pemilih umum di Amerika Serikat. Akan tetapi mereka jarang sekali melakukan kegiatan politik, semisal mengikuti kegiatan komunitas. Golongan ini banyaknya sekitar 15%.

Golongan lainnya adalah *complete activist* yaitu warga Negara yang benar-benar aktivis dalam artian aktif melakukan segala macam kegiatan politik, berkampanye dan sebagainya. Golongan ini ada sekitar 11%. Mereka kebanyakan berasal dari golongan sosial ekonomi atas, sedangkan orang tua dan golongan muda kurang terwakili.

Dan yang terakhir adalah golongan *Communicators Only*. yaitu mereka yang hanya melakukan kontak dengan pejabat pemerintah untuk memecahkan masalah tertentu yang berhubungan dengan mereka sendiri tetapi mereka tidak aktif dalam pemberian suara maupun kampanye. Mereka ini kebanyakan berasal dari kota-kota besar, Katolik, kulit putih dan golongan sosial

ekonomi bawah. (David Edwards, 1985: 104)

Kesimpulan

Dari hal di atas dapat diambil kesimpulan, *pertama* tingkat partisipasi politik warga negara di Amerika Serikat melalui pemilihan umum sangat rendah bila dibandingkan dengan di negara-negara lain. *Kedua*, mereka cenderung aktif berpartisipasi untuk mencari pemecahan dari bermacam-macam masalah masyarakat dan lingkungannya seperti melakukan kegiatan sosial dan lain sebagainya. *Ketiga*, mereka yang aktif berpartisipasi dalam bidang politik adalah mereka yang berpendidikan tinggi, status sosial ekonomi atas, tinggal di daerah perkotaan, berjenis kelamin laki-laki, orang-orang bisnis dan kaum kulit putih. sedangkan mereka yang partisipasi politiknya rendah adalah mereka yang berpendidikan rendah, status sosial ekonomi bawah, tinggal di pedesaan, berjenis kelamin perempuan, bekerja sebagai buruh kasar dan kaum kulit hitam.

Kepustakaan

Edwards, David, 1985, *The American Political Experience*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey

Redmond, WA, 2006, *Black Muslims*, Microsoft Encarta, Microsoft Corporation.

Huntington, Samuel and Joan Nelson, 1999 *No Easy Choice Political Participation in Developing Countries*, Alih Bahasa oleh Drs. Sahat Simamora, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Sastroatmodjo, Sudjiono, 1995, *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press, Semarang

Cipto, Bambang, 2003, *Politik & Pemerintahan Amerika*, Lingkaran, Yogyakarta

Mubiyarto, (1999), *Reformasi Sistem Ekonomi (Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan)* Aditya Media

Mubyarto, (2002), *Makalah untuk Konperensi Nasional Pengembangan Sosial Ekonomi*, Yogyakarta, 2002

Subandi, (2011), *Sistem Ekonomi Indonesia*, Alfabeta